

DEMONSTRASI DI HONG KONG DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA

7

Humphrey Wangke

Abstrak

Terjadinya demonstrasi penolakan terhadap RUU Ekstradisi di Hong Kong menunjukkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di negeri itu yang semakin tidak demokratis dan berkeadilan. Janji pemerintah China membentuk Special Administrative Region Hong Kong dalam mengimplemntasikan konsep satu negara dua sistem semakin jauh dari harapan. Pemerintah China justru semakin otoriter dan membatasi kebebasan masyarakat Hong Kong. Padahal tahun 2015, China dan negara-negara lainnya di dunia telah menyatakan dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, salah satunya Tujuan ke-16, yaitu terbentuknya pemerintahan yang damai dan berkeadilan untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk menjaga stabilitas di Hong Kong, sangat tepat bila Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menanggukhan pembahasan RUU Ekstradisi dan lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat agar keputusan yang diambil pemerintahannya tidak menimbulkan gejolak. Tersumbatnya komunikasi akan mendorong masyarakat bersikap lebih keras dan mencari dukungan luar negeri. Posisi Hong Kong sebagai sentra ekonomi di kawasan Pasifik perlu dipertimbangkan karena akan melibatkan kepentingan banyak negara.

Pendahuluan

Pada tanggal 2 Agustus 2015, sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dokumen aspiratif paling bersejarah dalam pembangunan dunia 15 tahun kedepan disebut dengan *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB). TPB merupakan dokumen kesepakatan internasional tentang pembangunan global agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Masyarakat internasional patut memberikan perhatian khusus pada Goal ke-16 dari TPB karena mewajibkan setiap negara untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga



yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan. Warga masyarakat harus bebas dari rasa takut dari segala bentuk kekerasan dan merasa aman saat menjalani kehidupan apa pun etnisitas, agama, atau orientasi politiknya. Untuk memajukan Goal-ke16 ini, setiap negara memerlukan lembaga publik yang efektif dan inklusif yang dapat memberikan rasa damai dan adil kepada masyarakat.

PBB menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya perdamaian dan rasa aman. Sebaliknya perdamaian dan rasa aman akan berada dalam bahaya bila tidak disertai dengan pembangunan secara berkelanjutan. Agenda TPB menekankan pentingnya membangun perdamaian, keadilan, dan masyarakat yang toleran berdasarkan penghormatan pada hak asasi manusia. Faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan, rasa tidak aman, ketidakadilan serta tata kelola pemerintahan yang buruk harus dicari solusinya.

Bila mencermati gerakan demonstrasi di Hong Kong sepanjang tahun 2019, sebenarnya terdapat masalah yang bersifat jangka panjang yang mendasari setiap aksi demonstrasi. Masalah tersebut adalah adanya keinginan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang demokratis dan adil agar setiap orang dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat. Untuk jangka waktu yang sangat panjang, masyarakat Hong Kong telah merasakan ketidakadilan di bidang ekonomi dan politik yang sangat lebar yang menyebabkan

penderitaan secara sosial dan ekonomi, terutama bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah. Biaya kepemilikan perumahan sangat tinggi karena adanya hegemoni antara kartel pengembang perumahan dengan mitra kerjanya yang menjadi anggota Legislatif dan Komite Pemilihan. Komite Pemilihan memiliki kekuasaan memilih Ketua Eksekutif.

Dengan mempelajari Goal ke-16 dari TPB, tulisan ini mencoba menganalisis mengapa ada peningkatan semangat untuk memperoleh kehidupan yang demokratis dan berkeadilan dalam kelompok-kelompok lokal di Hong Kong? Tulisan juga mengulas secara sekilas implikasi internasional dari demonstrasi di Hong Kong jika tidak ada upaya dari pemerintah Hong Kong untuk mencari solusi secara damai dan demokratis.

Memburuknya Demokrasi dan Ketidakadilan

Inggris mengembalikan pengelolaan Hong Kong ke Pemerintah China pada tanggal 1 Juli 1997 berdasarkan Deklarasi Bersama China-Inggris 1984 dan diperluas lagi dalam Hukum Dasar yang berfungsi sebagai konstitusi Hong Kong. Dokumen-dokumen ini menguraikan apa yang kemudian dikenal sebagai kerangka kerja “satu negara, dua sistem”. Semua istilah yang tercantum dalam Deklarasi Bersama dan Hukum Dasar tetap tidak berubah selama 50 tahun, artinya hingga 1 Juli 2047 tidak akan ada perubahan. Pasal 5 Hukum Dasar Hong Kong menyatakan, “Sistem sosialis dan kebijakan tidak akan dipraktikkan di Wilayah Administratif Khusus

Hong Kong, dan sistem kapitalis sebelumnya serta cara hidup tidak akan berubah selama 50 tahun”.

Namun faktanya, dalam satu dekade terakhir, masyarakat Hong Kong merasakan penurunan kondisi demokrasi dan hak asasi manusia berbarengan dengan meningkatnya campur tangan pemerintah China dalam urusan lokal. Berbagai insiden yang mencerminkan kemunduran demokrasi muncul di Hong Kong seperti kegagalan polisi melindungi para demonstran prodemokrasi, memenjarakan para pemimpin gerakan demonstrasi; pengusiran anggota legislatif yang menentang keputusan pemerintah China untuk mengevaluasi kembali pengaturan pengambilan sumpah untuk anggota parlemen; penahanan oleh otoritas China terhadap penduduk Hong Kong dan diangkut ke China; interpretasi oleh pemerintah China terhadap Hukum Dasar tentang pengadilan Hong Kong; dan serangan terhadap media, jurnalis dan pemilik media yang kritis terhadap China.

Masyarakat Hong Kong akhirnya menjadi sangat vokal terhadap memburuknya kondisi demokrasi dan ketidakadilan. Langkah mundur terbesar bagi demokrasi di Hong Kong adalah RUU Ekstradisi yang mengizinkan pemerintah Hong Kong melakukan ekstradisi ke setiap yurisdiksi yang sebelumnya tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, termasuk China. Demonstran menuntut untuk memilih Ketua Eksekutif dan anggota Dewan Legislatif secara demokratis dan adil untuk memastikan bahwa struktur politik Hong Kong telah mencerminkan kepentingan semua kelas di masyarakat, bukan hanya

kelas yang memiliki hak istimewa.

Para pendemo tidak meminta hak-hak baru yang saat ini tidak mereka miliki berdasarkan undang-undang, mereka hanya membela hak-hak yang seharusnya dijamin dalam model “satu negara, dua sistem”. Orientasi gerakan politik yang mereka lakukan, karenanya, lebih terfokus pada pelestarian identitas dan otonomi Hong Kong. Gerakan ini mencakup kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat yang terpinggirkan seperti memberikan advokasi otonomi yang lebih besar hingga kemerdekaan untuk Hong Kong, serta mengembangkan rasa identitas dan kelokalan yang kuat karena semakin meluasnya cengkeraman Pemerintah China terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.

Munculnya semangat kelokalan yang "anti-Cina" menyiratkan bahwa di masa yang akan datang, setiap demonstrasi akan bersifat konfrontatif. Dengan demikian, gerakan demokrasi di Hong Kong telah memasuki babak baru berupa demokrasi yang lebih terpolarisasi. Pembangunan demokrasi di Hong Kong terus berkembang meskipun implikasi dari terbentuknya kelompok-kelompok lokal yang baru didirikan belum sepenuhnya dieksplorasi.

Implikasi Demonstrasi Hong Kong

Pesan terpenting dari Goal ke-16 SDGs adalah kemampuan kita dalam mempertahankan masyarakat yang stabil, aman dan inklusif yang diatur oleh negara yang dapat dipercaya, responsif terhadap konstituen, bebas dari korupsi dan berkomitmen untuk

menghilangkan kekerasan yang dilakukan oleh lembaga negara. Setidaknya ada dua catatan untuk dimasa depan, yaitu memastikan struktur pemerintahan yang cukup kuat dalam menegakkan aturan hukum dan memastikan akses yang sama terhadap keadilan, menghilangkan korupsi dan penyuapan, dan mematuhi hukum yang sama yang diberlakukan kepada setiap warganya, dan membatasi kepentingan perusahaan dan tindakan kriminal. Kedua, kepercayaan warga negara terhadap semua aspek pemerintahan merupakan dasar paling kuat untuk membentuk masyarakat yang damai, adil, dan inklusif.

Salah satu ukuran penting dalam implementasi TPB adalah *No One Left Behind*. Untuk mencapai perdamaian dan keadilan, maka semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan agar terlihat semangat inklusivitas. Karena itu penting bagi pemerintah, masyarakat sipil dan bahkan partai politik untuk bekerja sama mengimplementasikan Goals ke-16 TPB dalam upaya mengurangi aksi-aksi kekerasan, memberikan keadilan, dan memastikan partisipasi inklusif setiap saat di semua kegiatan. Institusi nasional dan lokal bertanggung jawab dan perlu berada di tempat untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat secara adil.

Menghadapi situasi yang memburuk, sangat tepat bila Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memutuskan menangguhkan pembahasan RUU Ekstradisi dan akan lebih banyak berkomunikasi dan mendengar berbagai pandangan masyarakat agar keputusan yang diambil pemerintahannya

tidak menimbulkan gejala. Tersumbatnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat hanya akan mendorong masyarakat bersikap lebih keras dan mencari dukungan dari luar negeri seperti AS dan Inggris.

Langkah Carrie untuk berdialog dengan para demonstran sangat penting karena pimpinan demonstrasi mulai melibatkan pihak luar. Internasionalisasi masalah Hong Kong akan menjadi ancaman lain bagi pemerintahan Carrie Lam karena menunjukkan ketidakpercayaan para demonstran terhadap pemerintah. Pertemuan pemimpin demonstrasi Joshua Wong dengan Menlu Jerman Keiko Maas, desakan para pendemo agar Kongres AS mengesahkan RUU yang menyatakan dukungan pada para pendemo pro-demokrasi, serta kepergian Wong ke Taiwan untuk mengajak pemerintah setempat bersatu melawan pemerintahan China yang semakin otoriter, akan menyulitkan pemerintah Hong Kong dan juga China dalam mencari penyelesaian damai dan inklusif di Hong Kong.

Di antara tuntutan para demonstran adalah seruan agar Inggris menyatakan China telah melanggar Deklarasi Bersama China-Inggris 1984 yang merupakan cetak biru tentang bagaimana Hong Kong akan diperintah setelah kembali ke China pada tahun 1997. China menganggap deklarasi itu sebagai dokumen sejarah yang tidak lagi memiliki arti praktis, sementara Inggris mengatakan deklarasi itu adalah perjanjian yang sah secara hukum yang harus dijunjung tinggi. KTT negara-negara G7 di Biarritz, Prancis, Agustus 2019, telah

menegaskan pentingnya keberadaan Perjanjian China-Inggris 1984 tentang Hong Kong, dan menyerukan untuk menghindari kekerasan.

Pemerintah China harus menyadari bahwa para pelaku demonstrasi merupakan generasi baru yang lahir setelah penyerahan Hong Kong oleh pemerintah Inggris. Mereka mempunyai komitmen kuat terhadap demokrasi, otonomi, dan supremasi hukum. Apalagi generasi muda ini lebih siap dengan cara-cara radikal dalam memperjuangkan demokrasi dan ketimpangan ekonomi yang selama ini dirasakan. Para generasi muda yang berdemo anti-ekstradisi telah melihat hubungan yang jelas antara prospek ekonomi mereka yang mengecewakan dengan kurangnya Hong Kong dalam demokrasi dan otonomi politik.

Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Hong Kong, pemerintah China perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan masa depan Hong Kong untuk berdialog. Pelibatan semua pihak ini sangat penting karena Hong Kong mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda dengan kawasan China daratan. Perasaan kelokalan telah tumbuh di kalangan generasi baru Hong Kong yang harus diperhitungkan oleh pemerintah China. Posisi Hong Kong sebagai sentra ekonomi di kawasan Pasifik juga perlu dipertimbangkan karena akan melibatkan kepentingan banyak negara.

Bagi Indonesia apa yang terjadi di Hong Kong dapat menjadi pelajaran berharga dalam menyelesaikan berbagai masalah politik dan ekonomi yang terjadi di beberapa provinsi seperti Papua dan Papua Barat. Pemerintah perlu menghindari aksi kekerasan

dan mengedepankan pendekatan dialogis untuk meredam tuntutan para pendemo. Di samping dialogis, pemerintah juga wajib mengambil langkah tegas terhadap para pendemo yang mempersoalkan NKRI. Internasionalisasi masalah Papua dan Papua Barat oleh para warga Papua perlu diantisipasi sejak dini. Perasaan kelokalan warga setempat akan menjadi persoalan lain yang harus dihadapi pemerintah Indonesia.

Penutup

Demonstrasi yang terjadi di Hong Kong dalam tiga bulan terakhir menunjukkan bahwa pencapaian Goal ke-16 dari TPB tidak mudah dilakukan. Semangat inklusivitas dari tujuan Goal ke-16 TPB menuntut setiap pemerintah untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam negeri secara damai dan berkeadilan. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat Hong Kong menunjukkan belum adanya kehidupan yang demokratis dan berkeadilan menjadi pemicu munculnya tuntutan yang bersifat politis seperti otonomi, demokrasi, dan supremasi hukum serta janji "dua sistem" yang harus dipertahankan.

Konflik antara pemerintah dan kelompok pro demokrasi akan terus bergulir sepanjang belum adanya sikap yang sama tentang pemerintahan inklusif. Para pelaku demonstrasi yang lahir setelah penyerahan kedaulatan memiliki rasa kelokalan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya sehingga menuntut untuk mendapat perlakuan yang berbeda seperti yang dikehendaki oleh "prinsip satu negara dua sistem" tidak dapat ditawar-tawar lagi. Juga perlu dicatat, internasionalisasi masalah Hong Kong akan menjadi ancaman lain bagi

pemerintahan Carrie Lam karena menunjukkan ketidakpercayaan para demonstran terhadap pemerintah.

Referensi

- Annie Boyajian and Sarah Cook. (2019). *Democratic Crisis in Hong Kong: Recommendations for Policy Makers*. Hong Kong: Freedom House, Agustus 2019.
- “Benarkah Barat Bela Hong Kong”, *Kompas*, 12 September 2019, hal. 8.
- “Demonstran Desak Washington Tekan Beijing soal Tuntutan”, *Kompas*, 9 September 2019, hal. 18.
- Gregory S. Gordon. (2015). “When One Country Two Systems Meets One Person, One Vote: The Law of Treaties and the Handover Narrative Through the Crucible of Hong Kong Election Crisis”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 16. 2015

- “HK protesters in Fresh rallies as Lam says bill withdrawal first step”, *The Jakarta Post*, 7 September 2019, hal. 2.
- “Hong Kong Families Devide over Protest”, *The Jakarta Post*, 17 September 2019, hal. 15.
- “Inggris Didesak Lindungi Warga Hong Kong”, *Media Indonesia*, 16 September 2019, hal. 13.
- Jacques deLisle. (2019). “Hong Kong’s Summer Discontent”, *Foreign Policy Research Institute*, 3 September 2019.
- “Protesters call on UK to protect Hong Kong Residents From China”, *The Jakarta Post*, 16 September 2019, hal. 14.
- Ying-ho Kwong. (2016). “The Growth of Localism in Hong Kong: A New Path A Democracy in Hong Kong”, *China Perspectives*, 2016.



Humphrey Wangke
humprey.wangke@dpr.go.id

Dr. Drs. Humphrey Wangke, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada Tahun 2018 berhasil menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim, editor, (Yayasan Obor, 2018); “Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan”, editor (Yayasan Obor, 2017), “Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, Easy Kalimantan), (RJSSM, 2017), “The Management of Kutai National Park through the Multi-stakeholder Partnership” (Atlantis Press, 2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.